

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS,
DAN RASIO PERTUMBUHAN KEUANGAN DAERAH
DALAM MENILAI PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN TAHUN 2017-2021 PADA
KANTOR BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH :

**DIANA SYAHFITRI S. HASUGIAN
198330063**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/24

Access From (repository.uma.ac.id)1/4/24

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS,
DAN RASIO PERTUMBUHAN KEUANGAN DAERAH
DALAM MENILAI PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN TAHUN 2017-2021 PADA
KANTOR BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH :

**DIANA SYAHFITRI S. HASUGIAN
198330063**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/24

Access From (repository.uma.ac.id)1/4/24

**ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, RASIO EFEKTIVITAS,
DAN RASIO PERTUMBUHAN KEUANGAN DAERAH
DALAM MENILAI PENGUKURAN KINERJA
KEUANGAN TAHUN 2017-2021 PADA
KANTOR BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH :

DIANA SYAHFITRI S. HASUGIAN

198330063

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/4/24

Access From (repository.uma.ac.id)1/4/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017-2021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Nama : Diana Syahfitri S. Hasugian

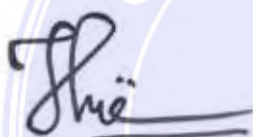
NPM : 198330063

Program Studi : Akuntansi

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembanding



(Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si)

(Hashbiana Dalimunthe, SE, M.Ak)

Pembimbing

Pembanding

Mengetahui:


(Ahmad Rafiq, BBA(Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)
Dekan
(Rana Fathimah Ananda, SE, M.Si)
Ka, Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus :

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINILITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksisanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 01 Maret 2024



Diana Syahfitri S. Hasugian
NPM.198330063

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana Syahfitri S. Hasugian
NPM : 198330063
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi & Bisnis
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak **Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017-2021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 01 Maret 2024
Yang menyatakan



Diana Syahfitri S. Hasugian
NPM. 198330063

ABSTRACT

This research aims to assess the analysis of the Independence Ratio, Effectiveness Ratio, and Regional Financial Growth Ratio in assessing financial performance measurements for 2017-2021 at the Deli Serdang Regency Regional Revenue Agency Office. The sample in this study used purposive sampling, namely financial reports on the realization of the budget and regional tax revenues of Deli Serdang Regency. The population in this research is financial reports. The type of data used is in the form of Qualitative Descriptive. The data source used is secondary data in the form of financial reports. The research results show that the regional financial independence ratio is categorized as capable because the region is already independent in matters of regional autonomy. Meanwhile, the PAD effectiveness ratio in 2017 was classified as quite effective and in 2018 was classified as less effective, namely 95.79% and 78.50%, respectively, in 2019, 2020 and 2021 it decreased, namely 69.56%, 68.05%, and 54.76%, has an average effectiveness ratio of 73.33% which is included in the ineffective group. The growth ratio illustrates that local governments cannot maintain and increase success from one period to the next.

Keywords: Regional Financial Independence Ratio, Financial Effectiveness Ratio Regions, Regional Financial Growth Ratios, Financial Performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017-2021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu laporan keuangan pada realisasi anggaran dan penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan. Jenis Data yang digunakan berbentuk Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan mampu karena daerah tersebut sudah mandiri dalam urusan otonomi daerah. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD pada tahun 2017 tergolong cukup efektif dan tahun 2018 tergolong kurang efektif yaitu sebesar 95,79% dan 78,50%, pada tahun 2019,2020, dan 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 69,56%, 68,05%, dan 54,76%, memiliki rata-rata rasio efektivitas sebesar 73,33% yang termasuk golongan tidak efektif. Untuk rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari periode ke periode berikutnya.

KataKunci : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan.

RIWAYAT HIDUP



Nama	Diana Syahfitri S. Hasugian
NPM	198330063
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 01 Desember 2001
Nama Orang Tua :	
Ayah	Hermanto Sihotang Hasugian
Ibu	Alm. Sugiartik
Riwayat Pendidikan	
SMP	SMP Sultan Iskandar Muda
SMA/SMK	SMA Sultan Iskandar Muda
Riwayat Studi Di UMA	Mangikuti Program MBKM
Pengalaman Pekerjaan	-Melakukan Kegiatan Magang Di Bank Mandiri -Melakukan Kegiatan Magang Di Kantor Badan Pendapatan Daerah
No. Hp/WA	081397138261 / 081283131026
Email	dianasyahfitri795@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan kasihnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017-2021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”**. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dadan Ramdan, M.Si, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA(Hons), MMgt, Ph.D,CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Hj. Saribulan Tambunan, SE, MMA, Selaku Dosen Ketua Meja Hijau yang telah meluangkan waktu dalam memberikan penulis bimbingan, arahan, dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Indah Cahya Sagala, S.Pd, M.Si selaku Pembimbing , yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi Skripsi ini hingga selesai.

6. Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak selaku Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan demi kesempurnaan Skripsi ini.
7. Ibu Shabrina Tri Asti Nasution, SE, M.Si selaku Sekretaris Pembimbing yang telah mengoreksi Skripsi hingga selesai.
8. Seluruh Dosen Universitas Medan Area yang selama ini membekali ilmu pengetahuan kepada peneliti.
9. Ayah saya yang telah memberikan dukungan selama penulisan penelitian ini, baik dukungan moral, material, nasihat dan doanya.
10. Abang-abang saya yang senantiasa memotivasi, menasehati, serta memberikan dukungan agar dapat segera menyelesaikan tugas akhir/skripsi.

Peneliti menyadari bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, dan waktu penulis. Untuk itu peneliti bersedia menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi peneliti sendiri.

Medan, 01 Maret 2024
Peneliti



Diana Syahfitri S. Hasugian
NPM. 198330063

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1.Perspektif Teori Entitas (<i>entity theory</i>)	11
2.2.Tinjauan Pustaka	12
2.2.1 Kinerja Keuangan.....	12
2.2.2.Rasio Keuangan Daerah.....	14
2.2.3 Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah.....	15
2.2.4.Jenis Rasio Keuangan	16
2.3.Penelitian Terdahulu	19
2.4.Kerangka Berpikir	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1.Desain Penelitian	28
3.2.Objek dan Waktu Penelitian	28

3.3. Definisi Operasional dan Instrumen Penelitian	29
3.4. Populasi dan Sampel	30
3.4.1 Populasi.....	30
3.4.2 Sampel.....	31
3.5. Metode Pengumpulan Data	31
3.6. Metode Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	34
4.1.1. Deskripsi Data	34
4.1.2. Analisis Data	36
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	36
b. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	39
c. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah	42
4.2. Pembahasan.....	44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	48
5.2. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk tahun yang berakhir 2017-2021	5
Tabel 2.1 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah	18
Tabel 2.2 Tingkat Efektivitas PAD.....	19
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Pola Hubungan Tingkat Kemampuan Daerah	33
Tabel 3.3 Tingkat Efektivitas PAD.....	33
Tabel 4.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah	38
Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) Kabupaten Deli Serdang.....	39
Tabel 4.3 Tingkat Efektivitas PAD.....	42
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas Daerah Kabupaten Deli Serdang Anggaran 2017-2021	42
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Daerah Kabupaten Deli Serdang Anggaran 2017-2021	44

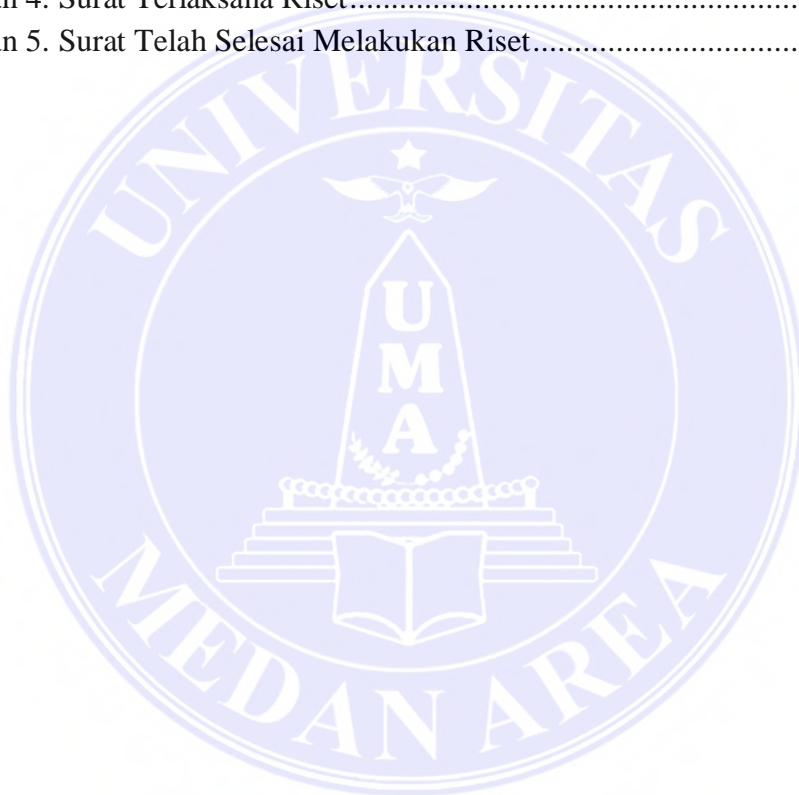
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir27



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021.....	53
Lampiran 2. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2021.....	73
Lampiran 3. Surat Izin Penelitian	77
Lampiran 4. Surat Terlaksana Riset.....	78
Lampiran 5. Surat Telah Selesai Melakukan Riset.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Salah satu perubahan besar dalam aspek ekonomi adalah kondisi pemerintahan daerah, dimana daerah yang telah ditetapkan memiliki otonomi daerah sendiri dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya, menjadikan kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya dengan kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Pemberian otonomi daerah dimaksudkan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada publik dan menciptakan proses atau pola pengambilan keputusan dalam ranah publik yang lebih baik dan demokratis dalam menggali potensi daerah yang ada serta sebesar-besarnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat setempat (Kementerian Keuangan, 2015).

Dalam rangka memajukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah yang dipimpin, pimpinan daerah dapat memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan daerah berdasarkan dari pendapatan daerah sendiri maupun dari luar daerah. Adapun sumber-sumber yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan

milik daerah, dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam daerah yang kemudian akan dikelola sesuai dengan kebutuhan daerah, melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, baik untuk peningkatan mutu pemerintahan daerah maupun kesejahteraan masyarakat setempat.

Terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah pusat dengan persetujuan DPR-RI telah menetapkan satu paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, diantaranya UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Keseluruhan perangkat UU ini, menjadi dasar bagi institusi negara dalam mengubah pola administrasi keuangan (*financial administration*) menjadi pengelolaan keuangan (*financial management*).

Pengelolaan keuangan (*financial management*), merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan terhadap kinerja keuangan daerah (Purba et al., 2021), yang didalam pelaksanaannya pemerintah daerah merealisasikan keuangan daerahnya melalui BAPENDA untuk mengelola keuangan daerah, sehingga menjadikan kinerja keuangan sebagai tolak ukur satu keberhasilan bagi daerah yang memiliki otonomnya sendiri. Untuk memberikan hasil yang maksimal dalam kinerja keuangan daerah, pemerintah daerah dapat

melakukannya dengan menggunakan satu teknik analisis laporan keuangan yang menghubungkan dua data keuangan dengan membagi satu data dengan data lainnya atau disebut juga dengan metode analisis rasio keuangan (Lukiana, 2013). Hasil dari analisis rasio keuangan selanjutnya akan dipergunakan sebagai evaluasi untuk menilai tingkat kemandirian, efisiensi, efektivitas, dan pertumbuhan daerah.

Pendapat yang sama juga dikatakan dari penelitian sebelumnya Alvina (2018) dalam menilai Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi dengan menggunakan analisis rasio keuangan secara keseluruhan mendapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari rasio efektivitas PAD Kota Jambi tahun 2011-2016 sudah efektif hal ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata tingkat efektivitas PAD, dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah Kota Jambi kurang efisien, dilihat dari rasio pertumbuhan rata-rata PAD, pendapatan daerah, Pemerintah Kota Jambi dari tahun 2011-2016 positif lebih baik dari pada pertumbuhan pendapatan daerah Kota Jambi, dan dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jambi 2011-2016 penyelenggaraan desentralisasi di Kota Jambi masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi (Alvina, 2018). Dengan dilakukannya pengukuran kinerja keuangan daerah, juga bertujuan dalam membantu kinerja pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya dan pengambilan keputusan, memperbaiki komunikasi kelembagaan, serta mewujudkan pertanggung jawaban publik (Mardiasmo, 2018).

Dalam kinerja keuangannya pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif, terlebih dahulu menentukan

arah kebijakan umum dan prioritas anggaran dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana arah kebijakan umum dan prioritas anggaran merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat sehingga dapat diperoleh kebijakan jangka pendek dan jangka menengah yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan daerah.

Daerah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dapat dilihat dari efektivitas pemerintah daerah menggali potensi daerahnya, sehingga mampu membuat daerah berdiri secara otonomi tanpa ketergantungan penuh kepada pemerintah pusat, dan memiliki porsi yang lebih besar dari pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan di daerah.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) diantaranya digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur didalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan rakyat serta transportasi darat dan laut, sehingga masyarakat turut menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Ketersediaan infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor potensi utama daerah, produktivitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi yang pada akhirnya tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi (Agustina, 2018)

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang memiliki anggaran yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Perkembangan jumlah anggaran yang mengalami peningkatan setiap tahun menyebabkan terjadinya surplus. Mengingat terjadinya surplus dari anggaran tersebut dapat di anggarkan oleh daerah

untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/daerah, dan pembentukan dana cadangan (Misalnya: untuk dana pilkada, untuk pembangunan infrastruktur), maka Rasio Keuangan yang akan sangat di perlukan dalam pengukuran kinerja keuangan yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio efektif dan efisiensi pendapatan asli daerah, dan Rasio pertumbuhan. Berikut beberapa tabel yang menjelaskan permasalahan keuangan Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kab.Deli Serdang untuk Tahun yang berakhir 2017-2021

Tahun	Anggaran	Realisasi	Target	Penyerapan (%)
2017	Rp 582.022.000.000	Rp 557.559.474.513,97	Rp 582.022.000.000	95,80%
2018	Rp 720.622.000.000	Rp 565.695.087.233,91	Rp 720.622.000.000	78,50%
2019	Rp 945.382.220.000	Rp 657.659.715.077,32	Rp 945.382.220.000	69,57%
2020	Rp 881.671.250.000	Rp 600.005.646.014,17	Rp 881.671.250.000	68,05%
2021	Rp 1.218.522.247.055	Rp 677.355.993.160,45	Rp 1.218.522.247.055	55,59%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Deli Serdang dimulai dari tahun anggaran 2017-2021 terdapat 5 (lima) periode anggaran yang belum semuanya terealisasi mencapai 100% serapan anggaran yang disahkan. Persentase tingkat penyerapan anggaran PAD yang hampir mendekati standar realisasi anggaran yang terjadi terkait kinerja keuangan, untuk target kinerja keuangan tahun 2017 yaitu sebesar 95,80% dari perbandingan realisasi pendapatan asli daerah APBD sebesar Rp 557.559.474.513,97 dibagi dengan pendapatan APBD sebesar Rp 582.022.000.000. dan ternyata pada tahun 2018

kinerja keuangan hanya sebesar 78,50% atau Rp 565.695.087.233,91 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 mencapai 95,80% atau Rp 557.559.474.513,97. Berdasarkan fenomena diatas membuat peneliti tertarik melakukan penelitian, khususnya dalam kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang karena hasil tahun 2018 sebesar 78,50%, kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang belum sesuai dengan target.

Meningkatnya anggaran alokasi PAD per tiap periode anggaran tidak selalu diiringi dengan meningkatnya realisasi penyerapan anggaran, hal tersebut mengindikasikan jika kurang maksimalnya pengelolaan keuangan daerah dalam proses pemanfaatan sumber penerimaan daerah berupa PAD terkait dengan pengeluaran belanja atas penyenggaraan urusan pemerintahan dan kebutuhan daerah.

Kemandirian suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah seperti belanja operasional dan belanja modal. Semakin besar kebutuhan belanja yang terpenuhi oleh PAD maka semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, begitu pula sebaliknya, semakin sedikit kebutuhan belanja yang terpenuhi, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah (Riswan, 2014).

Dari data diatas setiap tahun laporan realisasi Badan Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dan penurunan, seharusnya Badan Pendapatan Daerah kabupaten Deli Serdang harus bisa meningkatkan realisasi setiap tahun nya agar dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Beberapa penelitian yang melakukan penelitian mengenai analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan memberikan hasil yang bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2021) dengan judul penelitian “Analisis rasio keuangan untuk menilai keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan” memiliki hasil penelitian bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan dilihat dari rasio efektivitas PAD dikatakan kurang efektif dikarenakan efektivitas kinerja keuangan Kota Padangsidempuan rata-rata efektivitasnya masih dibawah 100%. Jika dilihat dari rasio efisiensi PAD sudah efisien, dikarenakan Pemerintah sudah mampu menekan jumlah belanja daerahnya dan mampu menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerahnya. Penelitian yang dilakukan oleh yang Alvina (2018) berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi” memiliki hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan dilihat dari rasio efektivitas PAD Kota Jambi tahun 2011-2016 sudah efektif hal ini ditunjukkan dengan hasil rata-rata tingkat efektivitas PAD, dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah Kota Jambi kurang efisien, dilihat dari rasio pertumbuhan rata-rata PAD, pendapatan daerah, Pemerintah Kota Jambi dari tahun 2011-2016 positif lebih baik dari pada pertumbuhan pendapatan daerah Kota Jambi, dan dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jambi 2011-2016 penyelenggaraan desentralisasi di Kota Jambi masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Rahmayati (2016) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013” memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa

kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertera diatas, maka dengan ini peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017-2021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang”**

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dalam penelitian dapat dirumuskan bahwa beberapa masalah mengenai anggaran yang belum semuanya terealisasi mencapai 100% serapan anggaran, hal tersebut menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan keuangan daerah dalam proses pemanfaatan sumber penerimaan daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait dengan pengeluaran belanja atas penyelenggaraan urusan pemerintah dan kebutuhan daerah.

1.3.Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah ?
2. Bagaimana kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari rasio efektivitas ?
3. Bagaimana kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari rasio pertumbuhan ?

1.4.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menilai pengukuran kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk menilai pengukuran kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari rasio efektivitas keuangan daerah.
3. Untuk menilai pengukuran kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari rasio pertumbuhan keuangan daerah.

1.5.Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

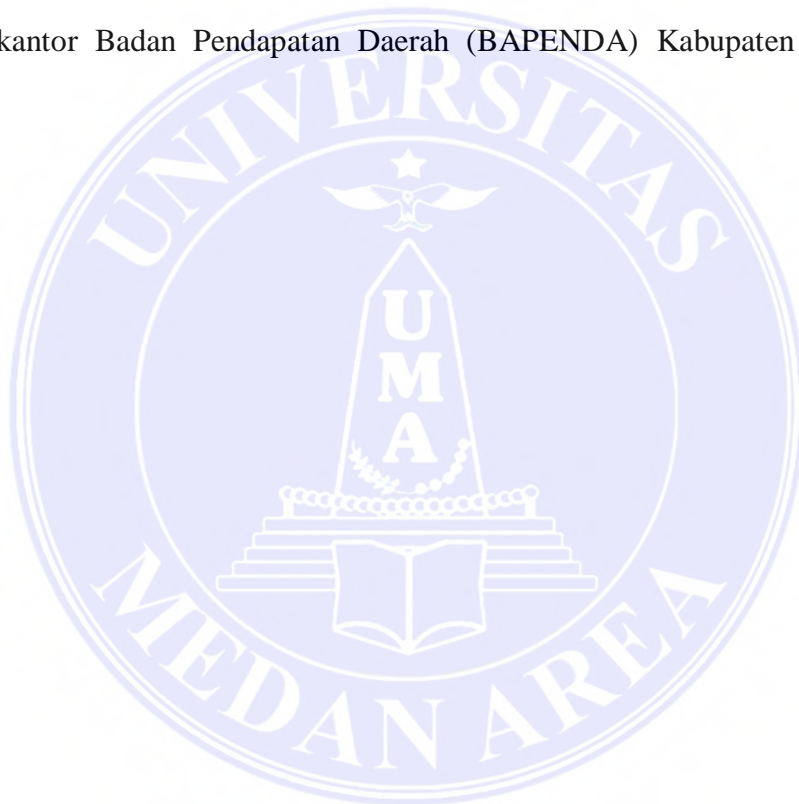
Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan menambah keilmuan dan menjadi sumber penelitian di masa yang akan datang agar penelitian ini terus berkembang.

3. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi kepada kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Deli Serdang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Entitas (*Entity Theory*)

Menurut Fathin Amalia (2022) menyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya.

Hubungan antara teori entitas dengan penelitian ini adalah Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan keuangannya. Laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi keuangan kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui entitas secara dalam, dimana adanya perbedaan karakteristik antar entitas yang akan memberikan perbedaan nilai dalam laporan keuangan masing-masing entitas. Laporan keuangan kemudian digunakan untuk memonitor dan membandingkan kinerja keuangan antar entitas yang sejenis (Mardiasmo, 2018)

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1 Kinerja Keuangan

Menurut Mahsun (2013) Kinerja berasal dari pengertian *performance*, ada pula yang memberikan pengertian *performance* adalah sebagai hasil kerja. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi artinya Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Dalam kaitannya dengan pemerintah daerah, keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian suatu hasil kerja atau pengelolaan di bidang keuangan. Kinerja keuangan adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu target yang telah ditetapkan.

Menurut Bastian (2013) Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan menghitung indikator masukan (*input*), indikator proses, keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Maksud dari indikator tersebut adalah :

1. Indikator masukan (*input*)

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Contohnya: jumlah dana yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang dibutuhkan, jumlah infrastruktur yang dibutuhkan, dan jumlah waktu yang dibutuhkan.

2. Indikator proses

Bagaimana organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, dan akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Contohnya: ketaatan pada peraturan perundang-undangan, rata-rata yang diperlukan untuk menghasilkan jasa/memproduksi.

3. Indikator keluaran

Segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik, indikator ini dipakai untuk mengukur keluaran yang dihasilkan, dan ketepatan dalam memproduksi barang/jasa.

4. Indikator hasil

Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Dengan indikator ini, organisasi/instansi dapat mengetahui apakah hasil yang diperoleh dalam bentuk output telah dapat dipakai sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Contohnya: kualitas produk/jasa, dan produktifitas pegawai yang dihasilkan.

5. Indikator manfaat

Sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan, artinya menggambarkan bagaimana manfaat yang dicapai dari indikator hasil. Contohnya: kepuasan masyarakat, dan partisipasi masyarakat.

6. Indikator dampak

Merupakan hasil yang dapat menimbulkan dampak positif atau negatif. Contohnya: meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan menurunnya tingkat pengangguran.

2.2.2.Rasio Keuangan Daerah

1.Pengertian Rasio Keuangan

Pengertian rasio keuangan menurut Kasmir (2018) rasio keuangan yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan cara membagi satu angka lainnya, rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja suatu organisasi.

Jadi rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam laporan keuangan, kemudian angka yang dibandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

2.Tujuan dan Manfaat

Kegiatan dalam analisis laporan dapat dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan, kemudian analisis laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dimiliki dalam satu periode. Disamping itu analisis laporan keuangan dapat dilakukan pula antara beberapa periode.

Analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk beberapa periode adalah menganalisis antara pos-pos yang ada dalam satu laporan, atau dapat pula dilakukan

agar lebih tepat dalam menilai kemajuan atau kinerja manajemen selanjutnya. Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan, secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan apa yang menjadi kekurangan suatu instansi.
3. Untuk mengetahui langkah- langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan kedepan.
4. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen kedepan apakah perlu diperbaiki.
5. Dapat juga dijadikan pembandingan dengan instansi lain.

2.2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. pengukuran

kinerja adalah suatu penilaian untuk mengetahui pencapaian kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi 3 tujuan yaitu (Mardiasmo, 2018) :

1. Memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
2. Membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Hasil dari analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk (Mahmudi, 2016) :

1. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

2.2.4. Jenis Rasio Keuangan

1. Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

$$RKKD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sumber: Sijabat dkk (2014)

Tabel 2.1 Pola hubungan tingkat kemandirian daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Sijabat dkk (2014)

1. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas adalah rasio yang kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Sijabat dkk (2014)

Tabel 2.2 Tingkat Efektivitas PAD

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Sijabat dkk (2014)

3. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Semakin banyaknya besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Pendapatan Daerah (PAD)} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}} \times 100\%$$

Sumber: Sijabat dkk(2014)

Keterangan :

PADt1 – PADt0 = Realisasi tahun ini dikurangi tahun sebelumnya

PADt0 = Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100 %. Namun semakin tinggi rasio efektivitas, kemampuan daerah pun semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi dicapai pemerintah daerah (Pemda).

2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian diperlukan dukungan dari berbagai hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dan hubungannya erat dengan penelitian tersebut.

Siregar (2021) dengan judul penelitian “Analisis rasio keuangan untuk menilai keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan” memiliki hasil penelitian bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Padangsidempuan dilihat dari rasio efektivitas PAD dikatakan kurang efektif dikarenakan efektivitas kinerja keuangan Kota Padangsidempuan rata-rata efektivitasnya masih dibawah 100%. Jika dilihat dari rasio efisiensi PAD sudah efisien , dikarenakan Pemerintah sudah mampu menekan

jumlah belanja daerahnya dan mampu menyeimbangkan pendapatan dan belanja daerahnya.

Fornia (2021) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010-2019” memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata selama tahun 2010 -2019 berada pada level rendah sekali yakni sebesar 21,69 persen dengan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jambi belum mampu sepenuhnyaa melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio efektivitas PAD rata-rata selama tahun 2010 - 2019 tergolong sangat efektif karena koefesiennya bearada diatas angka 100 persen yakni sebesar 104,91 persen. Hal ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam merealisasikan PAD melebihi jumlah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk memperoleh pendapat. Pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD adalah penerimaan dari sektor pajak daerah yang melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Jambi juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan, rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 11,16 persen. Ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan pendapatan Pemerintah

Kota Jambi positif. Sedangkan rasio pertumbuhan belanja, rata-rata pertumbuhan belanja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 10,82 persen.

Rahmayati (2016) dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013” memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Natalia (2015) dengan judul penelitian “Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman” memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

Pramono (2014) dengan judul penelitian “Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)” memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian kemandirian

Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah , karena rasionya hanya sebesar 15,83% (2010) dan 24,44% (2011).

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Andryny Lestari Siregar (2021)	Analisis rasio keuangan untuk menilai keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan.	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong rendah dan dalam katagori pola hubungan Instruktif yang artinya adalah dimana kedudukan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD dikatakan kurang efektif. Dikarenakan efektivitas kinerja keuangan Kota Padangsidempuan rata-rata efektivitasnya masih dibawah 100%. Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Padangsidempuan jika dilihat dari

				Rasio Pertumbuhan jika dilihat dari tahun ke tahun pertumbuhan pendapatan mengalami kenaikan maka dapat dikatakan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kota Padangsidempuan mengalami pertumbuhan secara positif.
2	Emilia Fornia (2021)	Analisis kinerja keuangan pemerintah kota jambi tahun 2010-2019	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata selama tahun 2010 -2019 berada pada level rendah sekali yakni sebesar 21,69 persen dengan pola hubungan instruktif. Hal ini berarti peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Pemerintah Kota Jambi belum mampu sepenuhnya melaksanakan otonomi daerah secara finansial. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio efektivitas PAD rata-rata selama tahun 2010 -2019 tergolong sangat efektif karena koefesiennya berada diatas angka 100 persen yakni sebesar 104,91 persen. Hal ini

			<p>berarti bahwa kemampuan Pemerintah Kota Jambi dalam merealisasikan PAD melebihi jumlah yang sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk memperoleh pendapat. Pendapatan yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD adalah penerimaan dari sektor pajak daerah yang melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Jambi juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi jika dilihat dari rasio pertumbuhan pendapatan, rata-rata pertumbuhan pendapatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 11,16 persen. Ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan pendapatan Pemerintah Kota Jambi positif. Sedangkan rasio pertumbuhan belanja, rata-rata pertumbuhan belanja dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 sebesar 10,82 persen.</p>
--	--	--	--

3	Anim Rahmayati (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.
4	Listiyani Natalia (2015)	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman	Deskriptif Kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

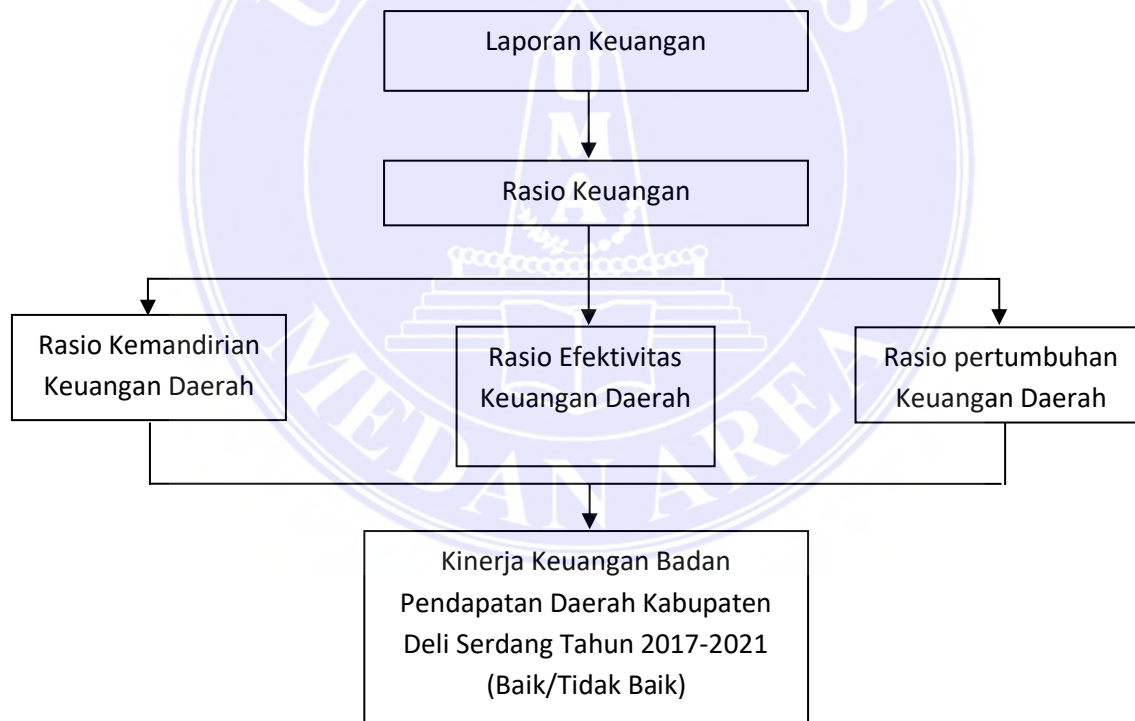
5	Joko Pramono (2014)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta untuk tahun 2010 dan 2011 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian kemandirian Pemerintah Kota Surakarta dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah , karena rasionya hanya sebesar 15,83% (2010) dan 24,44% (2011).
---	---------------------	---	------------	---

2.4.Kerangka Berpikir

Instansi Badan Pendapatan Daerah merupakan sumber-sumber pendapatan daerah seperti Dinas perpajakan, Dinas pasar dan sub dinas pelelangan ikan dan semua sub-sub dinas dalam unit penghasilan daerah dilebur dan di masukkan pada unit kerja Badan Pendapatan Daerah. Maka pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pada dasarnya merupakan kinerja keuangan yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang terkaji dalam laporan keuangan.

Analisis kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Penulis menyimpulkan kerangka teorinya yaitu untuk mengukur kinerja keuangan analisis kinerja yang digunakan adalah analisis perhitungan anggaran (pertumbuhan), rasio efektivitas, dan rasio kemandirian keuangan daerah, guna untuk mencapai kinerja keuangan yang efektif. Bagan yang digunakan adalah :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1.Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan.

3.2.Objek dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berlokasi di Jl. Sudirman, Petapahan, Kec.Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Deli Serdang, Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan berlangsung selama satu bulan, mulai 31 Mei sampai 30 Juni 2023.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Penelitian														
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sept	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pengajuan Judul	■														
2	Riset Awal		■													
3	Pembuatan Proposal		■													
4	Bimbingan Proposal		■	■	■	■										
5	Seminar Proposal							■	■							
6	Riset							■	■	■						
7	Penyusunan Skripsi								■	■	■					
8	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■				
9	Seminar Hasil											■	■			
10	Sidang Meja Hijau															■

3.3. Definisi Operasional dan Instrumen Penelitian

Untuk tidak memberikan penafsiran berbeda maka peneliti memberikan batasan, antara lain :

1. Laporan keuangan adalah merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Analisis laporan keuangan adalah analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
3. Kinerja keuangan adalah pengelolaan manajemen keuangan daerah atau pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan suatu

daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Variabel ini diukur dengan indikator :

- a. Rasio kemandirian keuangan daerah yaitu perbandingan antara PAD tahun anggaran 2017-2021 dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi & pinjaman tahun anggaran tahun 2017-2021.
- b. Rasio efektivitas yaitu perbandingan antara realisasi penerimaan PAD tahun anggaran 2017-2021 dengan target penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah tahun anggaran 2017-2021.
- c. Rasio pertumbuhan yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya dalam perusahaan dan dalam perkembangan ekonomi secara umum.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan anggota atau objek-objek yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2017:124) *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Artinya setiap subjek yang diambil dari populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

3.4.2.Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pada realisasi anggaran dan penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021.

3.5.Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan pencarian data sekunder dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan memperoleh data dari kantor Badan Pendapatan Daerah yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Deli Serdang Tahun anggaran 2017-2021.

3.6.Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data berupa rasio keuangan sebagai berikut :

1.Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD)

$$RKKD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sumber: Sijabat dkk (2014)

Tabel 3.2 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian %	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Sijabat dkk (2014)

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Sijabat dkk (2014)

Tabel 3.3 Tingkat Efektivitas PAD

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber: Sijabat dkk (2014)

3. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Semakin banyaknya besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

$$\text{Pendapatan Daerah (PAD)} = \frac{\text{PAD}_{t1} - \text{PAD}_{t0}}{\text{PAD}_{t0}} \times 100\%$$

Sumber: Sijabat (2014)

Keterangan :

$PADt1 - PADt0$ = Realisasi tahun ini dikurangi tahun sebelumnya

$PADt0$ = Realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100%. Namun semakin tinggi rasio efektivitas, kemampuan daerah pun semakin baik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang di ukur melalui rasio keuangan daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) sudah dikategorikan mampu dikarenakan peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang atau bahkan sudah tidak ada karena mengingat daerah yang benar-benar sudah mandiri dalam urusan otonomi daerah. Skala pengukuran ini dinilai mampu untuk mengukur kemandirian keuangan suatu daerah.
2. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD dikatakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 tergolong cukup efektif dan 2018 tergolong kurang efektif yaitu sebesar 95,79%, dan 78,50%. Tahun 2019, 2020, dan 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 69,56%, 68,05%, dan 54,76% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Hal tersebut menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli serdang belum mampu meningkatkan dan mempertahankan efektivitas daerah karena rasio efektivitas setiap tahunnya berada dibawah 100%. Skala pengukuran ini dinilai mampu untuk mengukur efektivitas suatu daerah.
3. Untuk rasio pertumbuhan dikatakan bahwa rasio pertumbuhan pengukuran kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada kantor Badan

Pendapatan Daerah tahun 2017-2018 mengalami penurunan, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16,25%, kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 yaitu sebesar -8,76%, dan mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 yaitu sebesar 12,89%. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Skala pengukuran ini dinilai mampu untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengukuran kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan keuangan daerah untuk menilai pemerintahan daerah.

2. Bagi Instansi

Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang lebih mengoptimalkan dan meningkatkan rasio efektivitas daerah karena rasio efektivitas dibawah 100% setiap tahunnya yang berarti kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah belum mampu. Pada rasio pertumbuhan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang perlu adanya peningkatan dan mempertahankan keberhasilan yang dicapai dari

period eke periode berikutnya. Dengan dilakukan evaluasi terhadap potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Prasti. 2018. "Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Aktivitas Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017." Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Alvina, Deva. 2018. "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi." Universitas Jambi.
- Amilia, Fathin. 2022. "Implementasi Akuntansi Pada Unit Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis SAK EMKM (STUDI PADA UMKM KOTA MATARAM). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Vol. 2 No. 1.
- Anggaran Program Dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021.
- Badan pendapatan daerah. Profil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 2016. <https://bapenda.deliserdangkab.go.id/website/web/profil>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, 2023. <https://deliserdangkab.bps.go.id/>
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. 2015. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=339>.
- Fornia, Emilia. 2021. "Analisis Keuangan Pemerintah Kota Jambi Tahun 2010-2019". Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi e-ISSN 2460-6235.
- Kasmir. 2018. Analisa Laporan Keuangan. Jakarta. Rajawali Pers.
- Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021.
- Lukiana, Ninik. 2013. "Implementasi Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan." *Jurnal WIGA* Vol. 3 No. 2, September 2013 ISSN NO 2088-0944.
- Mahmudi (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi ketiga. UPP STIM YKPN.
- Mahsun. Muhamad. 2013. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFE, Yogyakarta

- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi: Yogyakarta.
- Natalia, Listiyani. 2015.” Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman.” *Jurnal Sosio-Humaniora* Vol. 6 No. 1 Mei 2015 ISSN : 2087-1899.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah, 2011. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/167662/permendagri-no-21-tahun-2011>
- Purba et al. 2021. *The Effect of Cash Turnover and Accounts Receivable Turnover on Return On Asset. Indonesian College of Economics*. STEI. Jakarta
- Pramono, Joko. 2014.” Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Among Makarti*, Vol.7 No.13, Juli 2014.
- Rahmayati, Anim. 2016.” Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013.” *Jurnal EKA CIDA* Vol. 1 No. 1 Maret 2016.
- Riswan, Anthony Affandi .2014.” Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten/Kota Se-Sumatera)”. Universitas Bandar Lampung.
- Sijabat, Saleh, Wachid. 2014. Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Siregar, Andryny Lestari. 2021.” Analisis rasio Keuangan Untuk Menilai Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan.” Universitas Medan Area.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.



Lampiran 1**Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017-2021**

Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	PENDAPATAN	582.022.000.000,00	557.559.474.513,97	95,80
	Pendapatan Asli Daerah	582.022.000.000,00	557.559.474.513,97	95,80
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	32.856.834.349,00	31.408.309.380,00	95,59
	BELANJA PEGAWAI	32.856.834.349,00	31.408.309.380,00	95,59
3	BELANJA LANGSUNG	16.647.653.000,00	16.218.702.496,00	97,42
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.275.423.000,00	3.019.128.866,00	92,18
	Penyediaan jasa surat menyurat	8.400.000,00	5.598.000,00	66,64
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	759.000.000,00	745.782.614,00	98,26
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	331.050.000,00	312.725.000,00	94,46
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	249.635.000,00	248.850.500,00	99,69

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	58.560.000,00	18.463.649,00	31,53
Penyediaan alat tulis kantor	398.070.000,00	390.310.000,00	98,05
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	275.048.000,00	242.963.499,00	88,33
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.200.000,00	1.931.000,00	18,93
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	248.150.000,00	229.900.000,00	92,65
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	33.600.000,00	25.520.000,00	75,95
Penyediaan makanan dan minuman	100.390.000,00	100.390.000,00	100,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	803.320.000,00	696.694.604,00	86,73
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.174.580.000,00	1.110.687.141,00	94,56
Pembangunan Gedung Kantor	238.150.000,00	236.443.000,00	99,28
Pengadaan Mebeleur	172.790.000,00	171.600.000,00	99,31
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	742.640.000,00	692.100.141,00	93,19
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	21.000.000,00	10.544.000,00	50,21

	Program peningkatan disiplin aparatur	63.225.000,00	61.825.000,00	97,79
	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	9.050.000,00	7.650.000,00	84,53
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	54.175.000,00	54.175.000,00	100,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	208.000.000,00	208.000.000,00	100,00
	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	208.000.000,00	208.000.000,00	100,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	73.750.000,00	68.475.000,00	92,85
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	73.750.000,00	68.475.000,00	92,85
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	11.836.275.000,00	11.734.186.489,00	99,14
	Pendataan dan Pendaftaran WP/WR	566.950.000,00	564.850.000,00	99,63
	Penagihan Tunggakan PBB dan PAD bekerja sama dengan Kejaksaan	505.100.000,00	484.540.000,00	95,93
	Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	629.360.000,00	614.915.264,00	97,70
	Pelayanan dan Administrasi Benda - Benda Berharga	199.050.000,00	196.050.000,00	98,49

Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kabupaten Deli Serdang	4.360.450.000,00	4.348.139.225,00	99,72
Pengelolaan Pajak Daerah dan Pemungutan PBB di UPTD Kecamatan	2.903.300.000,00	2.903.300.000,00	100,00
Penyampaian SPPT dan DHKP PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	1.611.650.000,00	1.609.700.000,00	99,88
Cetak Masal SPPT dan DHKP PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	401.820.000,00	398.130.000,00	99,08
Penyusunan Peraturan Perundang Undangan Pajak Daerah	37.900.000,00	0,00	0,00
Fasilitasi dan Promosi Pajak Daerah	620.695.000,00	614.562.000,00	99,01
Program pengembangan wawasan kebangsaan	16.400.000,00	16.400.000,00	100,00
Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	16.400.000,00	16.400.000,00	100,00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	49.504.487.349,00	47.627.011.876,00	96,21
SURPLUS	532.517.512.651,00	509.932.462.637,97	95,76

Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	PENDAPATAN	720.622.000.000,00	565.695.087.233,91	78,50
	Pendapatan Asli Daerah	720.622.000.000,00	565.695.087.233,91	78,50
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	33.171.166.901,00	30.723.643.011,00	92,62
	BELANJA PEGAWAI	33.171.166.901,00	30.723.643.011,00	92,62
3	BELANJA LANGSUNG	16.647.653.000,00	15.017.813.873,00	90,21
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.227.963.000,00	2.934.675.748,00	90,91
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000,00	2.988.000,00	41,50
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	702.600.000,00	697.277.750,00	99,24
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	351.190.000,00	347.130.000,00	98,84
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	317.785.000,00	301.612.000,00	94,91
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	57.120.000,00	23.019.892,00	40,30

	Penyediaan Alat Tulis Kantor	398.420.000,00	394.380.000,00	98,99
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	242.098.000,00	241.546.569,00	99,77
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	130.200.000,00	119.400.000,00	91,71
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	43.800.000,00	29.420.000,00	67,17
	Penyediaan Makanan dan Minuman	144.110.000,00	136.928.000,00	95,02
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	728.440.000,00	536.723.537,00	73,68
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	105.000.000,00	104.250.000,00	99,29
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.538.365.000,00	895.206.625,00	58,19
	Pembangunan Gedung Kantor	95.000.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Peralatan Gedung / Kantor	501.665.000,00	0,00	0,00
	Pengadaan Mebeleur	166.200.000,00	160.700.000,00	96,69
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	756.000.000,00	729.526.625,00	96,50
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	19.500.000,00	4.980.000,00	25,54

	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	34.965.000,00	15.900.000,00	45,47
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	34.965.000,00	15.900.000,00	45,47
	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	11.830.160.000,00	11.157.031.500,00	94,31
	Pendataan dan Pendaftaran WP/WR	2.374.000.000,00	2.337.350.000,00	98,46
	Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	50.000.000,00	49.692.500,00	99,39
	Pengelolaan Pajak Daerah dan Pemungutan PBB di UPTD Kecamatan	3.567.200.000,00	3.550.700.000,00	99,54
	Penyampaian SPPT dan DHKP PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	1.535.900.000,00	1.531.350.000,00	99,70
	Cetak Masal SPPT dan DHKP PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	1.192.180.000,00	997.869.000,00	83,70
	Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kab. Deli Serdang	1.172.000.000,00	1.007.209.000,00	85,94
	Fasilitasi dan Promosi Pajak Daerah	951.450.000,00	732.937.000,00	77,03

	Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah	987.430.000,00	949.924.000,00	96,20
	Program pengembangan wawasan kebangsaan	16.200.000,00	15.000.000,00	92,59
	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	16.200.000,00	15.000.000,00	92,59
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	49.818.819.901,00	45.741.456.884,00	91,82
	SURPLUS	670.803.180.099,00	519.953.630.349,91	77,51

Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	PENDAPATAN	945.382.220.000,00	657.659.715.077,32	69,57
	Pendapatan Asli Daerah	945.382.220.000,00	657.659.715.077,32	69,57
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	38.078.073.188,00	35.945.796.692,00	94,40
	BELANJA PEGAWAI	38.078.073.188,00	35.945.796.692,00	94,40
3	BELANJA LANGSUNG	17.425.788.000,00	15.943.840.836,00	91,50

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.433.631.000,00	3.079.499.531,00	89,69
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000,00	7.206.000,00	85,79
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	732.600.000,00	727.682.310,00	99,33
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	422.465.000,00	389.105.000,00	92,10
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	317.950.000,00	290.807.000,00	91,46
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	63.620.000,00	18.275.405,00	28,73
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	398.420.000,00	398.420.000,00	100,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	260.544.000,00	260.025.700,00	99,80
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.200.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000,00	36.895.000,00	81,99
	Penyediaan Makanan dan Minuman	171.712.000,00	142.681.000,00	83,09
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	844.720.000,00	670.902.116,00	79,42
	Penyediaan Peralatan dan	102.000.000,00	101.500.000,00	99,51

	Perlengkapan Kerja			
	Penyediaan Jasa Publikasi Perkantoran	56.000.000,00	36.000.000,00	64,29
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.014.300.000,00	967.578.305,00	95,39
	Pembangunan Gedung Kantor	59.200.000,00	56.220.000,00	94,97
	Pengadaan Mebeleur	25.000.000,00	12.000.000,00	48,00
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	123.200.000,00	119.800.000,00	97,24
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	787.400.000,00	768.624.805,00	97,62
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	19.500.000,00	10.933.500,00	56,07
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	73.920.000,00	70.850.000,00	95,85
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	73.920.000,00	70.850.000,00	95,85
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	33.000.000,00	30.000.000,00	90,91
	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	33.000.000,00	30.000.000,00	90,91

	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	212.355.000,00	125.566.000,00	59,13
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	207.555.000,00	125.566.000,00	60,50
	Penyusunan Lakip, SKPD dan RKA-SKPD	4.800.000,00	0,00	0,00
	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	12.658.582.000,00	11.670.347.000,00	92,19
	Pendataan dan Pendaftaran WP/WR	2.795.700.000,00	2.689.085.000,00	96,19
	Validasi Pendapatan PPJ	155.000.000,00	129.185.000,00	83,35
	Penagihan Tunggakan PBB dan PAD Bekerja sama dengan Kejaksaan	646.100.000,00	620.150.000,00	95,98
	Pelayanan PBB Keliling	811.652.000,00	663.360.500,00	81,73
	Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	150.000.000,00	99.935.000,00	66,62
	Implementasi Sistem Online Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	301.000.000,00	298.150.000,00	99,05
	Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kab. Deli Serdang	130.000.000,00	129.840.000,00	99,88
	Pengelolaan Pajak Daerah dan Pemungutan PBB di UPTD Kecamatan	3.455.600.000,00	3.381.000.000,00	97,84

	Penyampaian SPPT dan DHKP PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	1.668.263.000,00	1.661.598.000,00	99,60
	Cetak Masal SPPT dan DHKP PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	1.049.000.000,00	857.649.500,00	81,76
	Pelayanan Pajak Daerah	544.707.000,00	395.007.000,00	72,52
	Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah	167.550.000,00	0,00	0,00
	Fasilitasi dan Promosi Pajak Daerah	350.700.000,00	320.100.000,00	91,27
	Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah	433.310.000,00	425.287.000,00	98,15
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	55.503.861.188,00	51.889.637.528,00	93,49
	SURPLUS	889.878.358.812,00	605.770.077.549,32	68,07

Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	PENDAPATAN	881.671.250.000,00	600.005.646.014,17	68,05

	Pendapatan Asli Daerah	881.671.250.000,00	600.005.646.014,17	68,05
2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31.800.768.910,00	29.980.092.511,00	94,27
	BELANJA PEGAWAI	31.800.768.910,00	29.980.092.511,00	94,27
3	BELANJA LANGSUNG	14.617.042.833,00	13.360.164.091,00	91,40
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.995.687.100,00	2.498.115.115,00	83,39
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.400.000,00	6.900.000,00	82,14
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	731.400.000,00	726.523.080,00	99,33
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	371.200.000,00	370.000.000,00	99,68
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	388.670.000,00	358.180.560,00	92,16
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	86.500.000,00	10.609.000,00	12,26
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	397.620.100,00	395.545.100,00	99,48
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	213.837.000,00	114.827.350,00	53,70
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1.810.000,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	45.000.000,00	44.880.000,00	99,73

	Undangan			
	Penyediaan Makanan dan Minuman	97.550.000,00	90.080.000,00	92,34
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	482.700.000,00	353.270.025,00	73,19
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	171.000.000,00	27.300.000,00	15,96
	Penyediaan Jasa Publikasi Perkantoran	0,00	0,00	0,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	980.060.000,00	783.223.794,00	79,92
	Pembangunan Gedung Kantor	30.000.000,00	29.383.000,00	97,94
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	330.000.000,00	190.000.000,00	57,58
	Pengadaan Mebeleur	8.000.000,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	594.860.000,00	556.303.694,00	93,52
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	17.200.000,00	7.537.100,00	43,82
	Program Peningkatan	22.000.000,00	0,00	0,00

Disiplin Aparatur				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	22.000.000,00	0,00	0,00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	72.408.000,00	57.560.000,00	79,49
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	72.408.000,00	57.560.000,00	79,49
	Penyusunan Lakip, SKPD dan RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00
	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	10.546.887.733,00	10.021.265.182,00	95,02
	Pendataan dan Pendaftaran WP/WR	3.708.016.365,00	3.696.286.952,00	99,68
	Validasi Pendapatan PPJ	91.200.000,00	20.075.000,00	22,01
	Penagihan Tunggalan PBB dan PAD Bekerja sama dengan Kejaksaan	70.200.000,00	70.200.000,00	100,00
	Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	100.000.000,00	99.740.000,00	99,74
	Implementasi Sistem Online Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	538.080.000,00	374.965.000,00	69,69

	(BPHTB)			
	Updating Data dan Pendataan Ulang PBB Kab. Deli Serdang	121.000.000,00	120.250.000,00	99,38
	Pengelolaan Pajak Daerah dan Pemungutan PBB di UPTD Kecamatan	5.085.024.368,00	5.012.774.368,00	98,58
	Penyampaian SPPT dan DHKP PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	42.963.000,00	36.817.500,00	85,70
	Cetak Masal SPPT dan DHKP PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan	554.240.000,00	548.920.000,00	99,04
	Penyusunan Kajian Potensi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
	Fasilitasi dan Promosi Pajak	122.000.000,00	41.236.362,00	33,80
	Pembukuan dan Verifikasi Piutang Pajak Daerah	114.164.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG	46.417.811.743,00	43.340.256.602,00	93,37
	SURPLUS	835.253.438.257,00	556.665.389.412,17	66,65

Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021

	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	%
1	PENDAPATAN	1.218.522.247.055,00	677.355.993.160,45	55,59
	Pendapatan Asli Daerah	1.218.522.247.055,00	677.355.993.160,45	55,59
2	BELANJA	55.252.965.322,00	50.795.116.463,00	91,93
	Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.459.485.912,00	35.253.817.128,00	91,66
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	38.011.826.972,00	34.852.677.128,00	91,69
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	202.932.320,00	197.340.000,00	97,24
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	244.726.620,00	203.800.000,00	83,28
	Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00
	Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.020.159.368,00	866.645.717,00	84,95
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.254.248,00	0,00	0,00

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	238.687.000,00	221.530.000,00	92,81
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	320.421.432,00	265.411.103,00	82,83
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.580.100,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.921.440,00	46.035.000,00	86,99
	Fasilitas Kunjungan Tamu	16.244.148,00	16.222.200,00	99,86
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	356.051.000,00	317.447.414,00	89,16
	Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.183.990.435,00	988.754.900,00	83,51
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.392.000,00	1.594.000,00	11,08
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	554.520.000,00	547.616.340,00	98,76
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	34.500.000,00	27.600.000,00	80,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	580.578.435,00	411.944.560,00	70,95
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	859.180.000,00	693.501.114,00	80,72

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	674.350.000,00	562.407.114,00	83,40
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bnagunan Lainnya	143.400.000,00	118.414.000,00	82,58
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.430.000,00	12.680.000,00	30,61
Program Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	13.730.149.607,00	12.992.397.604,00	94,63
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah , serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	728.730.787,00	643.717.500,00	88,33
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5.003.376.012,00	4.975.424.016,00	99,44
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	323.060.000,00	316.200.000,00	97,88
Pengolahan , Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	575.710.808,00	485.964.000,00	84,41
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta	522.280.912,00	115.750.000,00	22,16

	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	6.403.306.088,00	6.282.242.088,00	98,11
	Penagihan Pajak Daerah	173.685.000,00	173.100.000,00	99,66
	SURPLUS	1.163.269.281.733,00	626.560.876.697,45	53,86



Lampiran 2

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016-2021

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2,000,000,000.00	1,955,295,541.18	97.76
2. Pajak Restoran	14,000,000,000.00	17,626,828,769.32	125.91
3. Pajak Hiburan	900,000,000.00	951,263,653.28	105.70
4. Pajak Reklame	7,000,000,000.00	5,190,640,806.77	74.15
5. Pajak Penerangan Jalan	91,266,468,000.00	108,019,804,694.00	118.36
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	10,000,000,000.00	8,854,760,525.00	88.55
7. Pajak Parkir	5,000,000,000.00	5,672,677,150.00	113.45
8. Pajak ABT	9,000,000,000.00	9,819,201,747.75	109.10
9. Pajak Sarang Burung Walet	20,000,000.00	20,500,000.00	102.50
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	228,000,000,000.00	133,372,917,796.00	58.50
11. Pajak BPHTB	120,000,000,000.00	135,000,961,013.50	112.50
A. TOTAL PAJAK DAERAH	487,186,468,000.00	426,484,851,696.80	87.54
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3,851,411,211.00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		1,795,582,970.76	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0.00	5,646,994,181.76	
TOTAL KESELURUHAN	487,186,468,000.00	432,131,845,878.56	88.70

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	2,500,000,000.00	2,732,104,583.24	109.28
2. Pajak Restoran	21,000,000,000.00	22,356,815,491.76	106.46
3. Pajak Hiburan	1,500,000,000.00	1,525,251,698.50	101.68
4. Pajak Reklame	7,500,000,000.00	6,561,008,145.48	87.48
5. Pajak Penerangan Jalan	140,000,000,000.00	136,452,392,802.00	97.47
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	12,000,000,000.00	5,863,937,804.00	48.87
7. Pajak Parkir	8,000,000,000.00	7,286,765,617.20	91.08
8. Pajak ABT	12,000,000,000.00	10,455,827,227.14	87.13
9. Pajak Sarang Burung Walet	22,000,000.00	16,000,000.00	72.73
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237,500,000,000.00	141,364,693,425.00	59.52
11. Pajak BPHTB	140,000,000,000.00	218,995,236,199.71	156.43
A. TOTAL PAJAK DAERAH	582,022,000,000.00	553,610,032,994.03	95.12
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3,948,014,309.00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		1,427,210.94	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0.00	3,949,441,519.94	
TOTAL KESELURUHAN	582,022,000,000.00	557,559,474,513.97	95.80

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	4,500,000,000.00	5,896,302,010.88	131.03
2. Pajak Restoran	29,000,000,000.00	27,672,026,964.86	95.42
3. Pajak Hiburan	3,000,000,000.00	2,184,890,157.22	72.83
4. Pajak Reklame	8,500,000,000.00	6,522,718,231.63	76.74
5. Pajak Penerangan Jalan	167,500,000,000.00	156,048,741,298.00	93.16
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13,000,000,000.00	11,573,024,060.50	89.02
7. Pajak Parkir	8,500,000,000.00	8,797,807,265.00	103.50
8. Pajak ABT	14,500,000,000.00	13,300,562,363.40	91.73
9. Pajak Sarang Burung Walet	22,000,000.00	19,500,000.00	88.64
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	237,100,000,000.00	154,756,477,557.00	65.27
11. Pajak BPHTB	235,000,000,000.00	171,557,548,292.48	73.00
A. TOTAL PAJAK DAERAH	720,622,000,000.00	558,329,598,200.97	77.48
12. Pendapatan Denda PBB-P2		3,359,127,711.00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		4,006,361,321.94	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0.00	7,365,489,032.94	
TOTAL KESELURUHAN	720,622,000,000.00	565,695,087,233.91	78.50

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7,000,000,000.00	6,578,001,985.20	93.97
2. Pajak Restoran	38,000,000,000.00	30,786,202,584.13	81.02
3. Pajak Hiburan	3,000,000,000.00	3,982,072,635.00	132.74
4. Pajak Reklame	15,500,000,000.00	6,545,031,901.29	42.23
5. Pajak Penerangan Jalan	241,000,000,000.00	171,090,458,928.00	70.99
6. Pajak Bahan Galian Gol.C	13,000,000,000.00	1,613,802,580.00	12.41
7. Pajak Parkir	9,000,000,000.00	9,654,977,990.00	107.28
8. Pajak ABT	15,000,000,000.00	7,798,391,936.45	51.99
9. Pajak Sarang Burung Walet	22,000,000.00	22,000,000.00	100.00
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	327,860,220,000.00	197,077,538,748.00	60.11
11. Pajak BPHTB	276,000,000,000.00	217,414,634,498.72	78.77
A. TOTAL PAJAK DAERAH	945,382,220,000.00	652,563,113,786.79	69.03
12. Pendapatan Denda PBB-P2		5,092,708,814.00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya		3,892,476.53	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0.00	5,096,601,290.53	
TOTAL KESELURUHAN	945,382,220,000.00	657,659,715,077.32	69.57

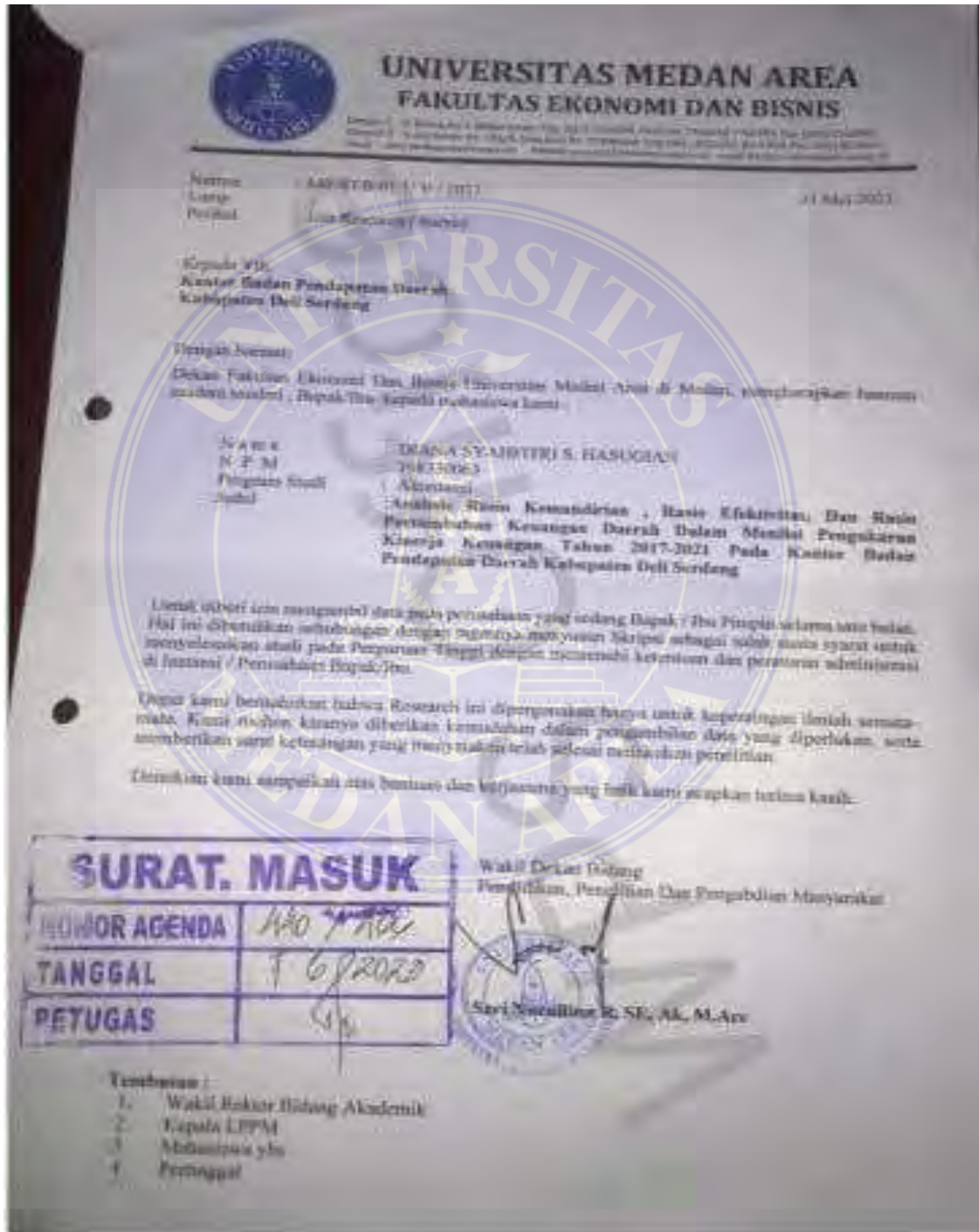
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2020

JENIS PENERIMAAN DAERAH	TARGET	REALISASI	%
1. Pajak Hotel	7,225,000,000.00	3,143,851,937.00	43.51
2. Pajak Restoran	35,275,000,000.00	18,500,845,680.13	52.45
3. Pajak Hiburan	2,975,000,000.00	1,728,960,967.00	58.12
4. Pajak Reklame	13,600,000,000.00	6,881,984,169.00	50.60
5. Pajak Penerangan Jalan	287,471,250,000.00	172,394,738,790.00	59.97
6. Pajak Bahan Galian GoL.C	11,900,000,000.00	743,346,884.00	6.25
7. Pajak Parkir	8,925,000,000.00	4,982,667,354.00	55.83
8. Pajak ABT	12,750,000,000.00	6,016,319,386.00	47.19
9. Pajak Sarang Burung Walet	50,000,000.00	12,600,000.00	25.20
10. PBB Perkotaan dan Pedesaan	259,250,000,000.00	184,662,461,562.00	71.23
11. Pajak BPHTB	242,250,000,000.00	197,248,899,169.64	81.42
A. TOTAL PAJAK DAERAH	881,671,250,000.00	596,316,675,898.77	67.63
12. Pendapatan Denda PBB-P2	0.00	3,669,790,909.00	
13. Lain-Lain PAD Yang SAH Lainnya	0.00	19,179,206.40	
B. LAIN-LAIN PAD YANG SAH LAINNYA	0.00	3,688,970,115.40	
TOTAL KESELURUHAN	881,671,250,000.00	600,005,646,014.17	68.05

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021

JENIS PAJAK	ANGGARAN	REALISASI 2021	%
Pajak Hotel - LRA	7,647,975,000.00	4,568,731,781.00	59.74
Pajak Restoran - LRA	38,000,000,000.00	21,692,359,275.00	57.09
Pajak Hiburan - LRA	4,000,000,000.00	1,451,776,607.00	36.29
Pajak Reklame - LRA	15,000,000,000.00	10,996,152,449.00	73.31
Pajak Penerangan Jalan - LRA	295,105,000,000.00	183,793,206,292.00	62.28
Pajak Parkir - LRA	11,000,000,000.00	4,111,433,217.00	37.38
Pajak Air Tanah - LRA	19,000,000,000.00	6,390,450,844.00	33.63
Pajak Sarang Burung Walet - LRA	50,000,000.00	17,700,000.00	35.40
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	36,000,000,000.00	5,182,008,132.00	14.39
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	512,719,272,055.00	192,217,130,174.00	37.49
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	250,000,000,000.00	242,041,888,735.00	96.82
JUMLAH	1,188,522,247,055.00	672,462,837,506.00	56.58
Lain-lain PAD yang SAH Lainnya	30,000,000,000.00	4,893,155,654.45	16.31
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain		114,063,399.00	
Pendapatan Denda Pajak Hotel		2,055,842.08	
Pendapatan Denda Pajak Restoran		86,671,592.98	
Pendapatan Denda Pajak Hiburan		6,815,897.00	
Pendapatan Denda Pajak Reklame		18,953,459.00	
Pendapatan Denda Pajak Parkir		8,848,213.50	
Pendapatan Denda Pajak ABT		55,549,112.89	
Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet		36,000.00	
Pendapatan Denda Galian C		252,000.00	
Pendapatan PBB P2	30,000,000,000.00	4,587,001,047.00	
Lain-lain PAD yang SAH Lainnya LRA		12,909,091.00	
TOTAL	1,218,522,247,055.00	677,355,993,160.45	55.59

3. Surat Izin Penelitian



4. Surat Terlaksana Riset

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO 2 LUBUK PAKAM - 20512
 TEL/PAX (061) - 7955788
 E-mail : bupenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, *10* Juni 2023

Nomor *440/Anab/2023*
 Lamp
 Sifat
 Hal Izin Riset

Kepada
 Yth Dekan Fakultas Ekonomi
 dan Bisnis
 Universitas Medan Area
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 440/FEB/01.1/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 Perihal Izin Research / Survey di Badan Pendapatan Daerah.

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan menyetujui Izin Riset di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang, atas nama :

Nama : Diana Syahfitri S. Hasugian
 Nim : 198330063
 Program Studi : Akuntansi
 Judul : Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017 - 2021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Demikian di sampaikan untuk di maklumi.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN DELI SERDANG
 SEKRETARIS

 HENDRA GUNAWAN AM., S.H., MH
 DELI SERDANG PENATA TK.1
 NIP: 19791205 201101 1 006

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/4/24

5. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.2 LUBUK PAKAM - 20512
 TEL/FAX (061) - 7955788
 E-mail : bapenda@deliserdangkab.go.id

Lubuk Pakam, 25 Juli 2023

Nomor Lampir Sifat Hal : 870/4240/2023
 : Selesai Riset

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area di –
 Tempat

Sehubungan dengan surat kami Nomor : 870/4103/2023 Tanggal 12 Juni 2023, perihal Selesai Riset, di Informasikan kepada Saudara bahwa Mahasiswi, atas nama :

Nama : Diana Syahfitri S. Hasugian
 Nim : 198330063
 Program Studi : Akuntansi
 Judul : Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai Pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017 - 2021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang

Telah selesai melaksanakan riset pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
 Demikian di sampaikan untuk di maklumi.

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
 SEKRETARIS
 HENDRI GUNAWAN, AM, SH, MH
 PENATA TK. I
 NIP: 19791205 201101 1 006

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/4/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)1/4/24